

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan peradaban manusia telah menciptakan kompetensi yang ketat dalam berbagai bidang, mereka yang unggul dalam kemampuan teknologi, manajemen, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) akan memainkan peranan penting dalam era globalisasi saat ini. Sebaliknya, negara-negara yang terbelakang dalam tiga komponen tersebut akan tertinggal dan menjadi korban arus globalisasi.

Berdasarkan Human Development Index November tahun 2011, Indonesia berada pada urutan 124 yang merupakan posisi terbawah diantara Negara Asean (Kompasiana, 27 Maret, 2012: 1). Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan sumber daya yang berlimpah kalah oleh Negara tetangga seperti Vietnam, Phillipines, Malaysia dan Negara Asean lainnya yang terbatas dari segi sumber daya alam. Kondisi tersebut menyadarkan kita bahwa sumber daya alam yang berlimpah tidak menjamin suatu Negara menjadi maju serta mampu mensejahterakan masyarakatnya. Sehingga hal tersebut perlu untuk ditindak lanjuti secara serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat mengingat tuntutan globalisasi yang semakin tinggi dan kebutuhan hidup yang semakin berkembang. Untuk itu, perlu adanya perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dengan pendidikan, manusia mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan memperbaiki kualitas produksi mereka melalui investasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan sebagai sarana *community empowerment* harus memperhatikan prinsip *equality of opportunity, accessibility and equity* sehingga peserta didik tidak hanya mengetahui sesuatu tetapi dapat melakukan sesuatu yang fungsional bagi kehidupannya.

Tujuan pendidikan Nasional di Negara Indonesia termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 yaitu *Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia*. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dinyatakan, bahwa :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pemerintah saat ini sedang berupaya meningkatkan mutu pendidikan dan mengembangkan program-program pembangunan nasional dengan maksud dapat mencapai efisiensi, efektivitas dan produktivitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Pembaharuan dan pengembangan pendidikan di Indonesia selain untuk memenuhi program-program pembangunan yaitu tenaga-tenaga yang terdidik dan terampil tetapi juga harus mampu menghadapi tantangan-tantangan baru seperti pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan kemampuan berkompetitif dalam era globalisasi

Realitas di Indonesia membuktikan bahwa ada kecenderungan tidak seimbangnya antara penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dengan kebutuhan dan tuntutan di lapangan. Hal tersebut berakibat pada terjadinya distorsi antara kebutuhan tenaga yang memiliki kompetensi khusus yang tidak mampu disiapkan oleh lembaga pendidikan terhadap tingkat kebutuhan sumber daya manusia di masyarakat khususnya sekolah. Lebih spesifik bahwa lembaga pendidikan di Indonesia cenderung mengalami penurunan dari segi kualitas dan meningkat dari segi kuantitas. Perubahan dari orde baru menjadi orde reformasi seharusnya menjadi pijakan dasar keharusan pendidikan untuk melakukan reorientasi ulang terhadap sistem dan pola pelaksanaan pendidikan nasional.

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan dilakukan secara menyeluruh yang meliputi: *input* (kurikulum, keuangan, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, dll), *proses* (proses belajar mengajar), dan *output* (lulusan). Revitalisasi pendidikan saat ini telah menjadi salah satu agenda utama pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional (KEMENDIKNAS) yang harus direformasi, disamping pemerataan pendidikan, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Di dalam Rencana Strategis (2010-2014: 17) dijelaskan bahwa :

Kementerian Pendidikan Nasional harus menyelenggarakan layanan yang prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif. Untuk mencapai visi tersebut dilaksanakan Misi 5 K, yaitu: ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian.

Penguatan kapasitas kelembagaan menjadi penting dikedepankan dalam upaya menciptakan pendidikan yang berkualitas melalui proses pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan atas kinerja. Kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dapat diukur dengan sejauh mana standar kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan terpenuhi sesuai dengan bidang garapannya masing-masing. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) Pasal 1 butir 5 dan 6, dinyatakan bahwa :

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Aktivitas manajemen yang terjadi di sekolah harus dikelola oleh tenaga ahli profesional karena sistem dan komponen dalam manajemen sekolah saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tenaga pendidik dan kependidikan memiliki peran yang sangat sentral dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam pengelolaan manajemen sekolah. Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (2009: 253) menyebutkan bahwa :

Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dipandang dari dimensi pembelajaran, peranan pendidik (guru, dosen, pamong belajar, instruktur, tutor, widyaiswara) dalam masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat.

Untuk itu, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan khususnya Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) penting untuk dilaksanakan agar peningkatan kualitas pendidikan khususnya mutu sekolah tercapai dengan maksimal melalui pengelolaan manajemen sekolah yang efektif dan efisien.

Beberapa komponen telah dengan tegas diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, akan tetapi standar untuk Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) baik standar kualifikasi maupun standar kompetensi diatur dengan PERMENDIKNAS No. 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah (TAS/M). Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) komponen yang mendukung dan mengimbangi pelayanan yang dilakukan oleh komponen lain di jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melayani fungsi pembelajaran, akuntabilitas terhadap masyarakat, serta dalam mendukung penciptaan pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu, pemenuhan standar kualifikasi Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) di jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam jabatan merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara sekolah.

Sebagai salah satu komponen dalam proses pembelajaran, tugas dan fungsi Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) di jenjang pendidikan dasar dan menengah tidak dapat dilakukan oleh tenaga pendidik. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) bersifat administratif yang tunduk pada aturan yang sifatnya khusus, pekerjaan yang memberikan pelayanan untuk kelancaran proses pembelajaran, lebih memerlukan

keterampilan khusus dibanding keahlian tertentu, memerlukan kompetensi yang berbeda dengan kompetensi yang disyaratkan untuk pendidik, serta tidak selalu berhubungan secara langsung dengan peserta didik kecuali untuk jabatan instruktur. Sesuai aturan kepegawaian, tugas Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) di jenjang pendidikan dasar dan menengah tidak boleh dirangkap oleh tenaga fungsional yang lain.

Pada kenyataannya, pemenuhan standar kualifikasi Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) khususnya implementasi PERMENDIKNAS No 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah (TAS/M) belum terlaksana dengan baik, faktor internal maupun faktor eksternal yang muncul dilapangan menjadi kendala dalam pemenuhan standar kualifikasi tersebut. Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) yang melaksanakan pekerjaan administratif di sekolah dilihat dari segi latar belakang pendidikan sebagian besar belum sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan dalam PERMENDIKNAS No. 24 tahun 2008. Kecenderungan di lapangan, sebagian besar sekolah lebih mengutamakan pengalaman dan kompetensi secara umum dalam proses rekrutmen Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) dan cenderung mengabaikan latar belakang pendidikan yang merupakan dasar penilaian terhadap kompetensi khusus yang dimiliki oleh seseorang.

Pandangan tersebut memposisikan Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) hanya sebagai *operasional staf* tidak diposisikan sebagai *supporting staf* yang mendukung komponen lain dalam melaksanakan kegiatan pelayanan administratif dan edukatif. Secara kualitas Tenaga Administrasi Sekolah

(TAS) merupakan *operasional staff* serta *supporting staff* yang mampu melaksanakan seluruh kegiatan administratif dan mampu membantu kepala sekolah dalam membuat kebijakan pengembangan sekolah serta membantu guru dalam menciptakan proses belajar mengajar yang berkualitas. Secara kuantitas, Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) memiliki dasar keilmuan khusus yang sesuai dengan bidang garapannya masing-masing sehingga tidak hanya melaksanakan kegiatan administratif tetapi juga mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas manajemen sekolah dengan kualifikasi dan kompetensi yang diakui berdasarkan hasil pendidikan yang telah di tempuh.

Lahirnya PERPRES No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melahirkan paradigma baru tentang penilaian terhadap ukuran pencapaian proses pendidikan sebagai basis pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang termasuk penilain terhadap kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan dalam bidang pendidikan yang merupakan bagian dari pengelolaan manajemen sekolah. Pengelolaan manajemen sekolah menjadi lebih efektif dan efisien karena peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu tenaga pendidik dan kependidikan menjadi sasaran utama dari setiap kriteria/standar kualifikasi yang harus dipenuhi.

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 8 Tahun 2012 Pasal 1 butir 1, menyatakan bahwa :

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja

dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Jenjang kualifikasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) tidak hanya dapat diperoleh melalui pendidikan formal yang ditandai dengan izasah pendidikan formal tetapi dapat diperoleh melalui dimensi lain yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan dari setiap bidang garapanya masing-masing termasuk tenaga kependidikan dalam proses pengelolaan manajemen sekolah, dalam penelitian ini Tenaga Administrasi Sekolah.

Sekolah Laborarium merupakan unsur penunjang akademik UPI yang didirikan sebagai pengembangan dari proyek perintis Sekolah Pembagunan (PPSP IKIP Bandug tahun 1978). Setelah melalui berbagai proses, pengelolaan sekolah dilanjutkan oleh yayasan kesejahteraan KORPRI Unit IKIP Bandung dan pada tahun ajar 2003/2004 sekolah ini diserahkan kepada Rektor UPI menjadi Sekolah Laboratorium Percontohan. Dengan adanya perubahan status ini, diharapkan sekolah ini berfungsi sebagai sekolah untuk pengembangan inovasi-inovasi pendidikan, praktik-praktik pengelolaan kependidikan dan proses pembelajaran, serta diharapkan menjadi rujukan bagi sekolah lain.

Tata cara penyelenggaraan sekolah mengacu pada Pokok-Pokok Penyelenggaraan Sekolah Laboratoium Percontohan UPI serta tata cara dan operasionalis persekolahan menginduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung dan atau Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. Sekolah Laboratorium ini

berstatus swasta dan memiliki dual responsibilities yakni ditekankan pada keterkaitan tanggung jawab kepada:

1. Secara kelembagaan terkait pada UPI
2. Secara teknik operasional mengikuti ketentuan Disdik Kota Bandung

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk mencoba mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan kualifikasi Tenaga Administrasi Sekolah berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di SMA Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia, sehingga judul yang diangkat adalah :

“Analisis Kebutuhan Tenaga Administrasi Sekolah Berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Di SMA Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia”.

B. Fokus Penelitian

Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kualifikasi Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) di SMA Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia. Secara terperinci masalah-masalah yang akan diteliti mencakup :

1. Bagaimanakah kualifikasi Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) di SMA Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)?
2. Bagaimanakah kondisi pelayanan administratif Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) di SMA Laboratorium Percontohan Universitas

Pendidikan Indonesia berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)?

3. Jenis Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) apa yang dibutuhkan di SMA Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dijabarkan diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini bermaksud untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai kualifikasi Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) di SMA Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan kualifikasi Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) di SMA Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia dengan memfokuskan perhatian pada aspek penting yaitu :

- a. Untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai kualifikasi Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) di SMA Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

- b. Untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi pelayanan administratif Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) di SMA Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- c. Untuk mengetahui informasi yang jelas mengenai jenis Tenaga Administrasi Sekolah yang dibutuhkan oleh SMA Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang jelas dan mendalam mengenai Kualifikasi Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di SMA Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia. Secara lebih terperinci lagi, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Melalui penelitian ini diharapkan bertambahnya kajian keilmuan yang bermanfaat bagi pengembang ilmu yang terkait dengan Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) khususnya bidang garapan administrasi pendidikan.
2. Bagi pihak sekolah, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pengembangan dan peningkatan mutu sekolah khususnya kinerja tenaga pendidik dan kependidikan

3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih dalam memahami ilmu administrasi pendidikan khususnya pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan.

E. Asumsi Penelitian

Berkaitan dengan kajian secara empirik tentang kualifikasi Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) dalam meningkatkan mutu sekolah, maka penelitian ini memiliki beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Profesional bersangkutan dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Seorang profesional harus mampu menguasai ilmu pengetahuannya secara mendalam, mampu melakukan kreativitas dan inovasi atas bidang yang digelutinya serta harus selalu berfikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
2. Semua pekerjaan yang bersifat administratif di sekolah tunduk pada aturan yang bersifat khusus karena lebih memerlukan keterampilan khusus dibanding keahlian tertentu sehingga harus dikelola oleh tenaga ahli profesional.
3. Pemenuhan standar kualifikasi Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) akan menunjang terciptanya proses belajar mengajar yang berkualitas dengan pengelolaan manajemen sekolah yang efektif dan efisien.
4. Mutu pendidikan melalui pengelolaan manajemen sekolah yang baik merupakan bentuk dari pelayanan administratif Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) yang berkualitas.

5. Analisis kebutuhan merupakan proses yang sistematis dalam menghimpun informasi dari tugas, kewajiban dan tanggung jawab suatu pekerjaan sehingga dapat menentukan tindakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
6. Analisis kebutuhan Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dilaksanakan di setiap satuan pendidikan dapat menghasilkan informasi yang efektif sebagai dasar dalam menentukan kebijakan peningkatan mutu sekolah khususnya kinerja Tenaga Administrasi Sekolah (TAS).
7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

F. Penjelasan Istilah

Istilah-istilah yang digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah :

Analisis memiliki pengertian penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dsb). (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008)

Kebutuhan adalah sesuatu yang harus didapat dan bila tidak terpenuhi maka mengganggu suatu kondisi ideal, (Achmad Iqbal, 2008: 18)

Administrasi merupakan satu pilihan dimana keputusan-keputusan dalam pencapaian tujuan dari berbagai bidang kehidupan akan dapat terlaksana secara efisien dan ekonomis. (Tim Dosen Administrasi Pendidikan 2009: 5)

Administrasi sekolah adalah pengaturan dan pendayagunaan segenap sumber daya sekolah secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pendidikan agar tujuan pendidikan di sekolah tercapai secara optimal, (Husaini Usman, 2006: 1)

Tenaga Administrasi Sekolah adalah tenaga kependidikan yang bertugas melakukan tugas-tugas administrasi untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. (PERMENDIKNAS No 24 Tahun 2008)

Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran, (Wahjosumidjo, 2002: 83).

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 1).

Profesional adalah mereka yang sangat kompeten atau memiliki kompetensi-kompetensi tertentu yang mendasari kinerjanya, (Suharsono, 2004: 211).

Kualifikasi adalah keahlian yg diperlukan untuk melakukan sesuatu (menduduki jabatan dsb). (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008)

Kompetensi adalah karakteristik dasar manusia yang dari pengalaman nyata (nampak dari perilaku) ditemukan mempengaruhi, atau dapat dipergunakan untuk memperkirakan (tingkat) performansi di tempat kerja atau kemampuan mengatasi persoalan pada suatu situasi tertentu, (Spencer, 1993: 9).

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. (PERPRES No. 8 Tahun 2012)

Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, in-formal, atau pengalaman kerja yang terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi jenjang 1 sampai dengan jenjang 9. (PERPRES No. 8 Tahun 2012)